



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
UNIT KERJA : DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : JAPRIZAL
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 193321

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.887.250.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 707 m ² /192 m ² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 1.067.250.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 357 m ² /127 m ² di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 330.000.000		
3. Tanah Seluas 50000 m ² di NATUNA, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
4. Tanah Seluas 1000 m ² di KEPULAUAN ANAMBAS, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
5. Tanah Seluas 78 m ² di KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	38.000.000
1. MOTOR, YAMAHA SCORPIO SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000		
2. LAINNYA, FIRMAN GENSET Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
3. LAINNYA, (SEPEDA) SEPEDA Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000		
4. MOTOR, HONDA VARIO 160CC Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 25.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	38.670.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	93.323.871
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----



Sub Total	Rp.	2.057.243.871
III. HUTANG	Rp.	145.000.000
IV.TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.912.243.871

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpnn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpnn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi penuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.